

Submitted:
27 September 2024
Revised:
10 Oktober 2024
Published:
30 November 2024

CONTACT

Correspondence Email:
masrudino49@gmail.com

Address:
Jl. Sosiohumaniora
Bulaksumur Yogyakarta
55281

KEYWORDS

Pertempuran Surabaya;
Memori Kolektif;
Rekonstruksi Memori;
Hari Pahlawan.

MENGINGAT DAN MELUPAKAN : POLITIK MEMORI PERTEMPURAN SURABAYA PADA MASA KEKUASAAN SUKARNO DAN SUHARTO, 1951-1988

MOHAMMAD MASRUDIN FIRDIYANSYAH

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

Keberanian arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu pada 10 November 1945 membuat pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Berbagai upacara dilakukan dan monumen dibangun untuk menjaga memori pertempuran itu. Namun, pembentukan memori tidak terlepas dari kepentingan tertentu. Penelitian ini mengkaji bagaimana memori Pertempuran Surabaya dibentuk selama masa pemerintahan Sukarno dan Suharto, mengapa memori tersebut dibangun, serta apa yang sengaja dilupakan. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini menunjukkan bahwa Sukarno memanfaatkan memori tersebut untuk meningkatkan nasionalisme dan mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Di bawah Suharto, konstruksi memori juga digunakan untuk mempromosikan agenda politiknya, menyebarkan anti-komunisme, dan melegitimasi peran militer. Kedua rezim menutupi pembunuhan terhadap warga sipil dan ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan penduduk lokal di Surabaya karena peristiwa ini dianggap merusak narasi nasionalisme dan kepahlawanan.

I. INTRODUCTION

Pada tahun 1970, surat kabar *Kompas* mengabarkan bahwa untuk memperingati Pertempuran Surabaya yang telah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, diadakan upacara besar-besaran di Surabaya pada tanggal 10 November. Presiden Suharto, yang sebelumnya lebih sering menghadiri perayaan Hari Pahlawan di Jakarta, pada tahun 1970 memusatkan peringatan tersebut di Surabaya, tempat terjadinya pertempuran (Anonim, 1970). Perayaan itu disertai dengan peresmian berbagai patung yang melambangkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hingga akhir Orde Baru, perayaan Hari Pahlawan dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai

macam bentuk, seperti cerita perjuangan, jalan kaki dengan iring-iringan poster perjuangan, teatrikal Pertempuran Surabaya, dan lain sebagainya (Anonim, 1984, hlm. 4).

Jika dilihat dalam waktu historis, Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa yang sudah terjadi, kejadiannya tidak bisa diulang. Namun, jika dilihat dari waktu liturgis (siklis), peristiwa masa lalu yang sudah terjadi itu coba dihidupkan kembali (Spiegel, 2002). Upacara peringatan, pembangunan tugu, monumen, dan patung, merupakan salah satu cara untuk menghidupkan kembali dan merawat memori pertempuran itu.

Pada masa pemerintahan Sukarno dan Suharto, memori individu para pejuang revolusi terus dibagikan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengalami peristiwa revolusi. Hal ini membuat masyarakat yang tidak ikut berjuang secara langsung pada saat gejolak revolusi merasa bahwa mereka juga memiliki memori perjuangan itu. Masyarakat tidak lagi melihat perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebagai memori para pejuang revolusi semata, tetapi juga sebagai memori kolektif mereka sendiri. Pertempuran 10 November pun dianggap sebagai pertempuran "kita" dan "mereka," bukan lagi antara "mereka" (pejuang revolusi) dan "mereka" (tentara sekutu) (Assmann, 2008, hlm. 52).

Proses pembentukan memori kolektif tidak serta-merta lepas dari kepentingan tertentu. Dalam pembentukan memori, ada proses seleksi, ada yang ditampilkan sekaligus dilupakan. Apa yang dibentuk dalam memori kolektif sangat lekat dengan siapa yang membentuk memori itu? Untuk apa memori itu dibentuk? dan siapa yang diuntungkan? Dalam penelitian ini, akan dikaji sejarah pembentukan memori kolektif Pertempuran Surabaya, untuk apa memori itu dibentuk dan hal apa saja yang dilupakan.

Fokus penelitian ini adalah pada pembentukan memori Pertempuran Surabaya di Surabaya. Oleh karena itu, meskipun terdapat peringatan Hari Pahlawan dan pembangunan patung Pertempuran Surabaya di luar Surabaya, hal tersebut tidak akan dibahas dalam penelitian ini. Pemerintahan Sukarno dan Suharto dipilih karena pada kedua periode tersebut, pembentukan memori Pertempuran Surabaya dilakukan secara besar-besaran dan terus-menerus untuk kepentingan tertentu. Keduanya juga membangun wacana memori pertempuran secara terpusat.

Kajian yang secara khusus membahas politik memori Pertempuran Surabaya pada masa pemerintahan Sukarno dan Suharto belum ditemukan. Sarkawi B. Husain dalam bukunya *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan Surabaya: 1930-1960* memang menjelaskan proses pembangunan Tugu Pahlawan di Surabaya. Namun, Sarkawi tidak fokus mengkaji politik memori Pertempuran Surabaya pada bidang-bidang lain, seperti peringatan Hari Pahlawan dan instrumen-instrumen lain yang digunakan untuk merawat memori pertempuran. Selain itu, Sarkawi hanya membahas hingga tahun 1960, sehingga politik memori di era Suharto tidak diulas sama sekali.

Penelitian yang juga menyinggung politik memori peristiwa revolusi ditulis Paul Bijl di artikelnya yang berjudul *Colonial Memory and Forgetting in the Netherlands and Indonesia*. Bijl

membandingkan memori revolusi yang ada di Belanda dan yang ada di Indonesia. Namun Bijl tidak secara spesifik membahas terkait dengan Pertempuran Surabaya, yang dikaji oleh lebih bersifat memori revolusi secara umum.

Kajian yang secara spesifik membahas mengenai Pertempuran Surabaya mayoritas bukanlah kajian politik memori. Pada tahun 1982 misalnya, pemerintah menerbitkan buku berjudul *Pertempuran Surabaya*. Di buku ini dijelaskan peristiwa Pertempuran Surabaya secara komprehensif tapi sangat menonjolkan peran militer. Aspek politik memori tidak dijelaskan sama sekali dalam buku ini. Buku ini juga sangat fokus terhadap narasi perjuangan yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Di artikel Robert Cribb berjudul *The Brief Genocide of Eurasians in Indonesia 1945/1946* dan William H. Frederick berjudul *The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia's National Revolution (1945–49): a Brief Genocide Reconsidered*, dijelaskan bahwa Pertempuran Surabaya tidak hanya sebatas pertempuran melawan tentara sekutu tapi ada juga ada aspek-aspek lain yang belum terungkap, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh tentara pejuang kemerdekaan kepada orang Eurasia. Meskipun demikian, kajian itu tidak secara spesifik membahas politik memori Pertempuran Surabaya. Kenapa kekerasan yang dilakukan pihak Indonesia tidak dirawat juga sama sekali tidak dijelaskan. Penulis lain, Abdul Wahid, di artikelnya yang terbit di *The Jakarta Post* dengan judul *The Untold Story of the Surabaya Battle of 1945* menyebut bahwa hal yang ditemukan oleh Frederick berbeda dengan narasi sejarah konvensional yang disampaikan melalui buku teks dan kurikulum. Wahid, sebagaimana penulis lain tidak menjelaskan bahwa bagaimana pembentukan memori pertempuran di Surabaya.

Dengan terbatasnya literatur yang secara spesifik mengkaji politik memori Pertempuran Surabaya pada masa pemerintahan Sukarno dan Suharto, artikel ini berusaha melengkapi kekosongan tersebut. Kajian semacam ini penting untuk memahami alasan di balik mengapa memori tentang heroisme *arek-arek* Surabaya sangat dirawat, sementara memori kelam atau kontroversial dalam Pertempuran Surabaya dilupakan. Artikel ini pertama-tama akan membahas peristiwa Pertempuran Surabaya, diikuti dengan pembahasan mengenai pembentukan memori pertempuran tersebut serta hal-hal yang sengaja dilupakan dalam narasi Pertempuran Surabaya.

II. METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama, heuristik, merupakan proses pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak terbatas pada sumber sekunder seperti buku dan artikel ilmiah, tetapi juga mencakup sumber primer. Sumber primer tersebut meliputi pemberitaan di surat kabar seperti *Kompas*, *Berita Yudha*, *Bisnis Indonesia*, serta deskripsi yang ditemukan pada monumen atau patung peringatan Pertempuran Surabaya.

Setelah sumber-sumber terkumpul, dilakukan verifikasi melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal bertujuan untuk memastikan keaslian sumber, sementara kritik internal dilakukan untuk menilai isi dan kredibilitas informasi yang disajikan. Langkah selanjutnya adalah interpretasi, di mana data yang telah diverifikasi ditafsirkan dalam konteks sejarah dan relevansi temanya. Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penyusunan hasil interpretasi menjadi tulisan yang runtut dan sistematis.

III. RESULT AND DISCUSSION

Pertempuran Surabaya dan Maknanya

Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak sekutu dan Bumiputra pada awal kemerdekaan. Pertempuran ini dipicu oleh kedatangan pihak sekutu (Inggris) yang terus-menerus menurunkan pasukannya di Surabaya. Pendaratan tentara itu kemudian menimbulkan kecurigaan di pihak pejuang Indonesia. Mereka menduga, pihak sekutu ingin kembali menguasai Indonesia yang kemerdekaannya sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Kecurigaan itu menemukan justifikasinya ketika pemuda Surabaya yang dipimpin oleh Moestopo, Dul Arwono, Abdul Wahab, Gubernur Suryo dan lain-lain menemukan bukti bahwa tentara sekutu yang didatangkan merupakan orang Belanda (Besuki, 1978, hlm. 4). Hal itu sejalan dengan tugas yang diberikan kepada Lord Louis Mountbatten selaku Panglima Tertinggi Sekutu Asia Tenggara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban sampai pihak Belanda dapat memerintah kembali. Pada akhir September, Laksamana Muda Patterson selaku komandan Skuadron Tempur Kelima Inggris mengumumkan tujuan tersebut secara terbuka. Menurut Patterson, hukum Belanda akan kembali ditegakkan di Jawa dan pemerintahan Belanda hanya akan tunduk kepada perintah panglima Mountbatten. Pengumuman itu segera diikuti oleh pendaratan tentara Belanda yang secara terang-terangan dilindungi oleh Inggris (George McTurnan Kahin, 2013, hlm. 205 & 206).

Tujuan tentara Sekutu untuk kembali menguasai Indonesia bertentangan dengan cita-cita masyarakat yang menginginkan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Hal ini menyebabkan bentrokan antara pihak Indonesia dan tentara Sekutu tak terhindarkan. Bentrokan sempat terhenti setelah Sukarno mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Mallaby dan Hawthorn. Namun, bentrokan kembali terjadi setelah Jenderal Mallaby terbunuh. Pada 7 November 1945, Mansergh, selaku Panglima Divisi ke-5, memberikan ultimatum kepada pemimpin Indonesia untuk berbaris di jalan raya utama Kota Surabaya pada pukul 18.00 dengan tangan terangkat. Mereka yang membawa senjata juga diperintahkan untuk menyerahkannya kepada pihak Sekutu (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986, hlm. 58). Jika ultimatum tersebut diabaikan, Sekutu mengancam akan melakukan serangan besar-besaran ke Surabaya pada pukul 06.00 pagi. Para pejuang Indonesia tidak gentar dan menolak mematuhi ultimatum tersebut. Pada 9 November, Sutomo bahkan menyerukan kepada arek-arek Surabaya untuk tidak

takut melawan tentara Sekutu. Akhirnya, Perang Surabaya pecah pada 10 November (Hermawan Sulisty, 1989, hlm. 4).

Ketika menyerang, tentara sekutu terkejut bahwa yang mereka hadapi tidak hanya kalangan militer tapi juga pemuda yang tidak memiliki pengalaman kemiliteran. Mereka mempersenjatai diri dengan bambu runcing, keris, parang, senjata rampasan dan apa pun yang bisa digunakan untuk berperang (Antony Reid, 2018, hlm. 36; Gerry van Klinken & Maarten van Der Bent, 2023, hlm. 130). Mereka bergabung dalam badan-badan perjuangan seperti Badan Keamanan Rakyat (BKR), Laskar, dan lain-lain (Sartono Kartodirdjo, 1981, hlm. 5). Dukungan terhadap perjuangan melawan tentara Sekutu datang dalam berbagai bentuk, tidak hanya dengan ikut berperang. Para perempuan, misalnya, menyediakan bekal bagi para pejuang, sementara yang lain bertugas sebagai tenaga medis. Bahkan dukun dan tukang sihir turut serta mendukung upaya mempertahankan kemerdekaan dengan menjampi-jampi agar nasi pasukan Inggris tidak bisa matang (Onghokham, 1985, hlm. 7).

Pertempuran Surabaya berakhir pada 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu berhasil memukul mundur para pejuang revolusi. Meskipun Indonesia gagal memenangkan pertempuran ini, Pertempuran Surabaya memiliki makna yang besar. *Pertama*, besarnya dukungan dari rakyat Indonesia membuat Inggris menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh rakyat banyak, bukan hanya oleh segelintir elite seperti yang diasumsikan sebelumnya. Hal ini mendorong Inggris untuk bersikap netral dan mendesak Belanda agar melakukan perundingan dengan Indonesia. Dengan demikian, Pertempuran Surabaya membuka jalan bagi perundingan diplomatik pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada 1946 dan 1947 (George McTurnan Kahin, 2013, hlm. 209; Ricklefs, 2008, hlm. 254). *Kedua*, Pertempuran Surabaya juga menjadi titik tolak perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Keberanian arek-arek Surabaya menginspirasi perlawanan terhadap Sekutu di daerah-daerah lain. Pentingnya makna Pertempuran Surabaya membuat pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan, yang menurut Antony Reid merupakan perayaan penting kedua setelah kemerdekaan. (Antony Reid, 2018, hlm. 37).

Pembentukan Memori Pertempuran Surabaya

Setelah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, pemerintah segera membangun monumen, patung, dan bangunan-bangunan yang dapat menjadi simbol perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tujuan pembangunan itu adalah agar memori kolektif perjuangan terus terpelihara dari generasi ke generasi. Ketika ingatan dan manusia dari generasi terdahulu sudah hilang, monumen itu diharapkan tetap eksis dan menjadi simbol pengingat bagi generasi berikutnya akan besarnya pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Abidin Kusno, 2009, hlm. 14). Dengan demikian, pertempuran yang sudah terjadi tidak hanya digunakan untuk membangun identitas nasional dan nasionalisme masa kini tapi juga masa depan (Putra, 2001, hlm. 472).

Sukarno ingin semangat kepahlawanan dan nasionalisme terus dikenang melalui pembangunan simbol-simbol di ruang publik. Pada tahun 1951 di atas reruntuhan gedung Raad van Justitie (atau Gedung Kempetai) yang hancur karena Pertempuran Surabaya, Doel Arwono selaku Walikota Surabaya pertama menyiasati pembangunan Tugu Pahlawan. Doel Arwono kemudian membentuk sebuah panitia pembangunan Tugu Pahlawan. Ketuanya adalah Doel Arwono sendiri (Sarkawi B. Husain, 2010, hlm. 65).

Pada tahun 1951, Sukarno datang ke Tugu Pahlawan untuk meletakkan batu pertama dan menanamkan piagam dibangunnya Tugu Pahlawan. Sukarno kemudian meminta rancangan gambar pembangunan Tugu Pahlawan dikirim kepada dirinya. Namun dari rancangan bangunan yang sudah dikirim, Sukarno tidak begitu sepakat dengan rancangan yang sudah diusulkan. Sukarno kemudian memberikan contoh rancangan Tugu Pahlawan dengan meletakkan paku usuk di atas meja dengan posisi terbalik (Sarkawi B. Husain, 2010, hlm. 66). Selain itu, Sukarno juga menolak rencana dibangunnya patung di sekitar Tugu Pahlawan. Sukarno tidak menginginkan tugu identik dengan tokoh tertentu karena Sukarno menganggap hal tersebut membuat Tugu Pahlawan terasa milik satu generasi. Sukarno ingin Tugu Pahlawan dimiliki oleh semua generasi sehingga nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme bisa terus terwariskan.

“Seperti begini inilah tugu itu yang harus kalian bangun. Dan tak perlu dihadirkan patung-patung, sebab tokoh-tokoh itu bersifat temporer, sebaliknya Tugu ini harus menggambarkan keabadian” (Museum Sepuluh Nopember, t.t.).

Pembangunan Tugu Pahlawan dimulai pada bulan Februari tahun 1952 dan selesai pada 10 November 1945. Tinggi bangunan Tugu Pahlawan adalah 45 yard (41,13 meter) tidak 45 meter seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Angka 45 itu melambangkan pertempuran yang terjadi pada tahun 1945. Bentuk yang lain masih sesuai dengan rencana awal. Badan memiliki sepuluh lekukan yang melambangkan tanggal pertempuran. Di dalam tugu, terdapat pintu masuk untuk naik ke atas tugu. Tangganya berjumlah sebelas tingkat. Jumlah itu melambangkan bulan terjadinya Pertempuran Surabaya (Anonim, 1981, hlm. 1; Yusuf Abdullah Puar, 1981, hlm. 4). Pada bagian bawah tugu (dinding relief), terdapat ornamen berbentuk trisula, stambha, cangka, cakra, dan padma sula. Makna dari seluruh ornamen tersebut adalah keberanian yang berkobar dalam mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan berbagai senjata, yang dalam pewayangan disimbolkan dengan senjata Cakra Pusaka Kresna dan Trisula Pusaka Arjuna (Sarkawi B. Husain, 2010, hlm. 67).

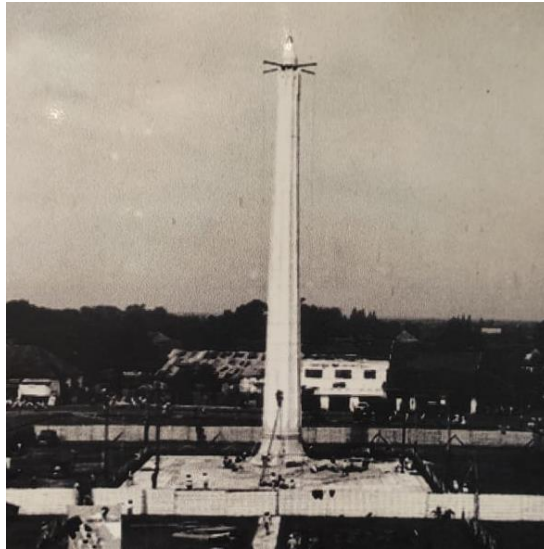


Foto 1. Pembangunan Tugu Pahlawan
Sumber : Museum Sepuluh Nopember

Pada saat peresmian Tugu Pahlawan 10 November 1952, Sukarno menyatakan bahwa pembangunan Tugu Pahlawan sangat penting karena tugu itu sebagai simbol bahwa bangsa Indonesia memiliki jiwa yang sangat besar. Dengan demikian, selain untuk membentuk identitas nasional di lingkup masyarakat Indonesia sendiri, pembangunan Tugu Pahlawan juga ditujukan untuk membentuk identitas dan meninggikan drajat Indonesia di lingkup global.

“Peristiwa 10 Nopember inilah yang membuktikan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia tidak berdjiwa ketjil seperti yang mereka tahu, Djiwa yang besar jg diiringi oleh tekad yang sebulatnja dibuktikan oleh pahlawan2 kita kepada dunia” (Sarkawi B. Husain, 2010, hlm. 68).

Setelah berhasil mendirikan Tugu Pahlawan, upaya memorisasi Pertempuran Surabaya tidak berhenti. Pada tahun 1957, Sukarno mengeluarkan keputusan mengenai pahlawan kemerdekaan nasional. Melalui keputusan tersebut, Sukarno juga menginstruksikan agar setiap 10 November diperingati sebagai hari untuk mengenang jiwa para pahlawan nasional, peringatan yang sebenarnya sudah dilaksanakan sebelumnya (Aditya Nugroho Widiadi, 2019, hlm. 75). Hari Pahlawan sendiri ditetapkan oleh Sukarno pada 1959, yang mana keputusan tersebut tertuang dalam Keppres No. 316 tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional (Alexander Haryanto, 2021). Dengan demikian, penjaga memori Pertempuran Surabaya tidak hanya Tugu Pahlawan tapi juga berbagai macam ritual dan upacara yang dilakukan oleh kekuasaan pada setiap 10 November.

Berbeda dengan Tugu Pahlawan, perayaan Hari Pahlawan melalui upacara dan peringatan-peringatan tertentu mempunyai pemaknaan yang lebih dinamis dan fleksibel. Pemaknaan terhadap Hari Pahlawan sangat ditentukan oleh wacana kekuasaan pada saat dilakukannya peringatan itu. Pada 1961 saat peringatan Hari Pahlawan, Sukarno menyampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya (Irfani, 2016, hlm. 135). Sukarno merupakan sosok yang sangat terampil memainkan simbol. Ajakan menghormati jasa pahlawan

di Pertempuran Surabaya secara tidak langsung juga ajakan untuk mengingat dan menghormati peran yang dimainkannya sebagai presiden dan aktor yang berhasil mendorong gencatan senjata (Aditya Nugroho Widiadi, 2019, hlm. 75).

Setelah Suharto berkuasa, hal-hal yang berkaitan dengan peran besar Sukarno dihilangkan. Penghilangan peran Sukarno tidak hanya ketika peringatan Pertempuran Surabaya tapi juga dalam aspek-aspek yang lain seperti historiografi dan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1968 misalnya, sangat anti terhadap Sukarno dan lebih condong mengagungkan peran Suharto dalam menyelamatkan Indonesia dari hiperinflasi dan kejahatan PKI (Zulkarnain, 2019, hlm. 369). Sukarno tidak lagi mendapat tempat yang signifikan dalam narasi sejarah resmi.

Suharto juga mengambil langkah-langkah baru untuk membedakan era kepemimpinannya dari periode sebelumnya. Masa kepemimpinannya ia sebut sebagai "Orde Baru," sementara era Sukarno disebut sebagai "Orde Lama." Orde Lama dianggap oleh Suharto sebagai masa penuh masalah, seperti hiperinflasi dan kerusuhan, sehingga "strategi pembangunan" yang diperkenalkan oleh Widjojo Nitisastro dipandang sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut (Anderson, 1983, hlm. 488).

Suharto mengejawantahkan strategi pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk dalam memaknai Pertempuran Surabaya. Pada tahun 1970, peringatan Hari Pahlawan dilakukan di Surabaya. Tema yang dipilih oleh Suharto adalah "Menggalang ketahanan nasional dengan memantapkan pelaksanaan pembangunan dan demokrasi pantjasila". Dari tema tersebut dapat diketahui bahwa Suharto tidak hanya ingin memperingati Hari Pahlawan untuk membangun kesadaran nasionalisme tapi juga mengonteksikannya dengan kepentingan waktu itu, kepentingan pembangunan (Anonim, 1970, hlm. 1).

Selain menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan, Suharto pada tahun 1970 juga meresmikan monumen Jenderal Besar Sudirman di Jalan Yos Soedarso pada 10 November. Patung tersebut menampilkan Jenderal Sudirman berdiri tegap dengan tongkat komando di tangan. Pada bagian bawah patung, terdapat marmer yang memuat keterangan bahwa patung ini diresmikan oleh Suharto, serta kata-kata mutiara dari Jenderal Sudirman yang diharapkan dapat menginspirasi semangat perjuangan bagi generasi berikutnya. Sehari setelahnya, lima patung perjuangan lainnya juga diresmikan di berbagai sudut kota Surabaya. Patung-patung tersebut tersebar di Jembatan Merah, Alun-Alun Contong, depan Hotel Siola, depan Hotel Majapahit, dan di Jalan Kombes M. Duriyat. Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejuang revolusi yang terlibat langsung dalam pertempuran, seperti Bung Tomo, Soengkono, dan lainnya (Anonim, 1970, hlm. 1, 2022).



Foto 2. Patung di depan Siola, salah satu patung yang diresmikan tahun 1970

Sumber : Detik.com

Pemerintah menyadari bahwa patung memang dapat menjadi penjaga memori kolektif pertempuran yang pernah terjadi di Surabaya tapi cerita pertempuran itu tidak bisa diceritakan melalui patung. Suharto kemudian menunjuk kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigjen Nugroho Notosusanto untuk menulis Pertempuran Surabaya. Tulisan Nugroho tentang Pertempuran Surabaya pertama terbit tahun 1970, versi bahasa Inggrisnya berjudul *The Battle of Surabaya*. Namun buku itu tidak begitu lengkap, tebalnya hanya 15 halaman (Nugroho Notosusanto, 1970). Pada tahun 1974, Nugroho Notosusanto lebih serius dalam menulis Pertempuran Surabaya. Nugroho mengumpulkan pihak yang terlibat para pejuang revolusi untuk berkumpul di ruang Grahadi Jalan Pemuda. Tokoh yang hadir adalah Mayjen Jonosewojo, Dr. Ruslan Abdulgani, Mayjen Sungkono, Dul Arwono, Mayjen Polisi Yasin, Mayor Rakimin, TK. Kundan, dan lain-lain. Total pejuang yang hadir adalah 100 orang. Nugroho meminta mereka menyampaikan kesaksiannya saat mengikuti pertempuran (Anonim, 1974, hlm. 2).

Setelah berhasil menggali informasi dari para pejuang revolusi yang mayoritas adalah para militer, buku *Pertempuran Surabaya* diterbitkan pada tahun 1982. Buku ini ditujukan untuk menginspirasi generasi mendatang sehingga isinya sangat kental dengan hal-hal heroisme. Peran militer dalam Pertempuran Surabaya juga sangat ditonjolkan, seperti kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah (Aditya Nugroho Widiadi, 2019, hlm. 75). Meskipun demikian, buku ini juga menampilkan peran perempuan yang mendukung logistik kepada pejuang kemerdekaan. Peran Sukarno dalam melakukan gencatan senjata juga tetap disampaikan (Nugroho Notosusanto, 1985, hlm. 60 & 132). Hal tersebut berbeda dengan saat peringatan upacara Hari Pahlawan, yang mana peran Sukarno jarang sekali disebutkan.

Selain membangun memori kolektif melalui buku, pembangunan memori kolektif melalui patung atau monumen di Surabaya juga terus berlanjut. Pada tahun 1979, patung Gubernur Suryo diresmikan. Patung ini dibangun dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Pada patung Gubernur Suryo yang terletak di depan Taman Apsari, terdapat pernyataan sikap Gubernur Suryo yang menolak ultimatum Inggris. Kalimat "lebih baik hancur daripada dijajah kembali" terpampang jelas di bawah kaki patung Gubernur Suryo (Anonim, 2023c). Meskipun

pembangunan ini tidak diprakarsai langsung oleh Suharto, hal tersebut tidak serta-merta lepas dari kepentingannya. Sistem pemerintahan yang sentralistis pada masa itu mengharuskan setiap kebijakan daerah, termasuk pembangunan patung, untuk mendapatkan izin dari pusat. Terlebih lagi, pemerintah pusat memiliki otoritas besar dalam menentukan Gubernur Jawa Timur (Mohammad Agus, 2012, hlm. 83).

Bagi Suharto, pembangunan patung dan segala hal yang berhubungan dengan Gubernur Suryo tidak hanya bertujuan untuk mengenang Pertempuran Surabaya, tetapi juga untuk mengingatkan publik akan kekejaman PKI. Pada tahun 1987, Suharto meresmikan sebuah jembatan di Surabaya yang diberi nama Jembatan Suryo. Dalam peresmian tersebut, Suharto secara terbuka menyatakan:

“Beliau (Suryo) adalah pejuang yang ikut merebut dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan R.T Soerjo bukan gugur oleh peluru penjajah tapi atas kekejaman PKI dalam pemberontakan Madiun 1948”(Anonim, 1987, hlm. 3).

Suharto membangun pesan bahwa, gubernur pertama Jatim yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan itu tidak bisa mengabdikan dirinya lagi karena ulah PKI. Suharto sendiri sudah membangun monumen yang secara khusus memang ditujukan untuk mengingat kekejaman PKI terhadap Gubernur Suryo di Ngawi tahun 1975 (Roewadji, 1995, hlm. 6).

Pada dekade 1980-an, kaki tangan Orde Baru, terutama pemerintah provinsi dan militer, terus meresmikan berbagai monumen untuk menjaga memori Pertempuran Surabaya tetap hidup. Sebagian besar monumen, patung, dan prasasti yang diresmikan berfokus pada peran militer dan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1980, Kepala Staf Angkatan Darat, Poniman, meresmikan Monumen Wira Surya Agung. Monumen ini dibangun di Jalan Darmo Wonokromo, lokasi pertempuran antara pihak Sekutu dan para pejuang Indonesia. Monumen tersebut menampilkan empat patung dengan pose tiarap, merunduk, tegak, dan berdiri, yang melambangkan tahapan perkembangan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di monumen ini juga tercantum nama-nama korban pertempuran sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur (Anonim, 2023a). Setahun kemudian, Gubernur Jawa Timur meresmikan Monumen Bambu Runcing, sebagai simbol keberanian para pejuang revolusi yang bertempur meskipun hanya berbekal bambu runcing (Lambertus Hurek, 2021).

Pembangunan monumen dan prasasti dalam jumlah besar terjadi pada tahun 1988. Pada 2 Oktober 1988, Panglima ABRI meresmikan Monumen Perjuangan Polri. Sesuai dengan namanya, monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan polisi dalam mempertahankan kemerdekaan. Di monumen ini, terdapat proklamasi M. Jasin yang berbunyi, "Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 dengan menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia"(Anonim, 2023b; Hurek, 2022). Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Bulan November 1988, Gubernur Jatim, Soelarlo, meresmikan 4 buah prasasti yang berlokasi di tepi barat dan timur Tugu Pahlawan, di depan

gedung gubernur lama dan di depan gedung PDAM yang terletak di jalan Basuki Rachmat. Prasasti di Tugu Pahlawan menjelaskan bahwa di lokasi itu sebelumnya terdapat gedung Raad van Justitie dan tempat terjadinya pertempuran pihak Jepang dengan pejuang kemerdekaan. Prasasti di kantor gubernur lama, tertulis bahwa Bung Karno melakukan perundingan di tempat itu, dan Gubernur Suryo menolak ultimatum dari sekutu juga di tempat itu. Sementara itu, prasasti di gedung PDAM menjelaskan bahwa, bangunan itu dulu menjadi markas BKR yang dipimpin Sungkono (Anonim, 1988, hlm. 9).

Berbagai macam peringatan, monumen, patung, prasasti yang dibangun oleh Suharto selalu memuat pesan nasionalisme tapi pesan itu kadang juga berdampingan dengan pesan-pesan yang lain, seperti pesan pembangunan, pesan kekejaman PKI, dan pesan peran besar militer dalam merawat Indonesia. Artinya, monumen, peringatan, patung, yang dibangun oleh Suharto ditujukan untuk menyimpan pesan yang lebih beragam dibandingkan dengan beberapa instrumen penyimpan memori kolektif yang dibangun atau dilakukan oleh Sukarno.

Tujuan memorisasi pertempuran Surabaya	Sukarno	Suharto
Untuk membangun identitas nasional	Di lingkup nasional dan internasional	Di lingkup nasional
Untuk menonjolkan peran militer	Peran militer dan individu tertentu tidak terlalu ditonjolkan	Peran militer lebih ditonjolkan
Untuk menyampaikan pesan pembangunan	Tidak	Pesan pembangunan terus menerus disampaikan
Untuk menyampaikan kekejaman PKI	Tidak	Kekejaman PKI disampaikan melalui pembangunan patung dan Jembatan Gubernur Suryo

Tabel 1. Perbedaan tujuan memorisasi pertempuran Surabaya antara Sukarno dan Suharto

Hal-hal dalam Pertempuran Surabaya yang dilupakan

Sebagai negara yang baru merdeka, memori perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangat penting untuk membangun identitas nasional dan legitimasi berdirinya negara Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan memori tersebut didasarkan pada narasi perjuangan *kita versus mereka* (Indonesia melawan sekutu). Monumen, patung, museum, dan berbagai simbol lainnya dibangun untuk merawat memori perjuangan melawan sekutu. Jika tidak demikian, memori tersebut digunakan untuk menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh tentara sekutu terhadap pejuang Indonesia. Hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa dalam membangun identitas nasional secara sengaja dilupakan, atau jika mungkin, ditutupi rapat-rapat (Assmann, 2008, hlm. 64 & 67; Gross, 2002, hlm. 342). Sebagai rezim yang memonopoli pembentukan memori kolektif, baik Sukarno maupun Suharto secara sengaja melakukan pelupaan

tersebut. Suharto bahkan mengemukakannya secara terbuka. Saat menghadiri pencaanangan Gerakan Nasional Pelestarian dan Pengamalan Nilai-nilai Kebudayaan di Tugu Pahlawan tahun 1995, Suharto berkata, "Yang jelek-jelek janganlah diungkit-ungkit untuk menonjolkan kejelekan orang tua kita" ((O.D.Y, 1995, hlm. 1)

Dikarenakan penguasa sengaja melupakan episode tertentu dalam Pertempuran Surabaya, pemahaman terhadap peristiwa revolusi menjadi parsial. Ada beberapa hal yang belum dipahami karena hal tersebut tidak pernah ditransmisikan dalam bentuk monumen, patung, dan museum. Pada gilirannya, tidak adanya pewarisan tersebut membuat masyarakat mengalami amnesia kolektif (Bijl, 2012, hlm. 443). Ada beberapa kejadian di Pertempuran Surabaya yang sengaja dilupakan agar amnesia kolektif terjadi.

Pertama, pelupaan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan. Menurut Cribb, Frederick dan Wahid, sosok yang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil tidak hanya Belanda tapi juga dari pihak Indonesia. Golongan yang tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan BKR melakukan kekerasan terhadap lelaki, perempuan, bahkan anak-anak Eurasia. Sebelum terbunuh, orang Eurasia dilecehkan terlebih dahulu, mereka disuruh melepas celana dalam dan punggung mereka ditulis NICA. Mereka juga dipukuli. Ada beberapa orang yang kemudian meninggal karena tidak tahan menghadapi siksaan. Salah satu kekejaman yang menjadi pengalaman paling traumatis di kalangan orang Eurasia adalah ketika mereka melihat perempuan payudaranya dibelah dan kemaluannya ditusuk dengan bambu (Abdul Wahid, 2013; Cribb, 2008, hlm. 425; Frederick, 2012, hlm. 363 & 364).

Kekerasan dan pembunuhan terhadap orang Eurasia terjadi di penjara Kalisosok dan Simpang Club. Namun kejadian yang pernah terjadi di dua tempat itu tidak pernah dibangun sebuah monumen atau pertanda apa pun yang mengingatkan bahwa tempat itu pernah menjadi saksi bisu kekerasan terhadap orang Eurasia karena hal tersebut dianggap akan merusak narasi bahwa leluhur kita adalah pahlawan sementara sekutu adalah pecundang (Michael Rothberg, 2009, hlm. 5). Dengan demikian, pelupaan terhadap kekejaman itu bukan karena ingatan terhadap kekejaman itu memang sudah benar-benar hilang tetapi karena penguasa tidak mewadahi dan melakukan memorisasi atas peristiwa itu (Bijl, 2012, hlm. 443 & 453; Michael Rothberg, 2009, hlm. 5). Apalagi korban dari pembunuhan tersebut adalah orang yang sudah tidak tinggal di Indonesia sehingga suara mereka tidak terdengar lagi gaungnya. Namun, keberadaan korban itu di Indonesia tidak bisa menjadi jaminan bahwa suara mereka tersampaikan karena kontrol memori terkuat masih berada di tangan penguasa. Ketika korban kekerasan revolusi masih tetap di Indonesia seperti orang Cina dan Ambon, mereka masih belum mampu membangun wacana memori tandingan sebaik penguasa (Abdul Wahid, 2013; Adrian Vickers, 2011, hlm. 152).

Pemerintah sendiri lebih suka menghindar dan lari dari memori kelam masa lalu alih-alih menerimanya sebagai sebuah pembelajaran (Raben, 2012, hlm. 494). Tak heran memori kelam yang dialami oleh orang Eurasia itu lebih terawat di Belanda daripada di Indonesia. Di Belanda,

memorisasi atas kekerasan yang dialami oleh orang Eurasia itu diwariskan melalui berbagai tulisan, salah satu tulisan itu berjudul *Eurasian Dilemma in Indonesia* karya Paul W. Van Der Veur yang sudah terbit pada tahun 1960. Melalui tulisan itu, Paul W. Van Der Veur menjelaskan bahwa lelaki, perempuan, dan anak-anak Eurasia pada periode revolusi menjadi korban kekerasan dari tentara republik (Van Der Veur, 1960, hlm. 49). Waktu itu, tulisan seperti itu merupakan hal yang tidak umum di Indonesia karena Indonesia mencoba membangun tulisan sejarah yang bercorak Indonesiasentris, yang mana menampilkan kejahatan pejuang republik bukanlah fokus utama.

Kedua, pelupaan terhadap adanya gerakan yang tidak seragam antara pusat dan daerah. Menurut keterangan Ruslan Abdulghani sebagai orang yang terlibat langsung dalam pertempuran, ada pemuda yang sejalan dengan pusat tapi ada juga yang tidak. Pada saat Menteri Negara, Sartono, datang ke Surabaya, dia dihampiri pemuda sambil ditodong pistol. Pemuda itu berkata “apa itu pemerintah pusat? Tidak ada artinya” (Roeslan Abdulgani, 1981, hlm. 67–68). Selain itu, menurut Ricklef, sikap Sukarno yang menerima tawaran pihak sekutu untuk melakukan gencatan senjata membuat beberapa pemuda revolusioner tidak mempercayainya lagi (Ricklefs, 2008, hlm. 225).

Adanya perbedaan sikap dan konflik internal tersebut jarang sekali dijelaskan dalam narasi historiografi resmi karena hal itu akan mengacaukan narasi bahwa rakyat Indonesia secara padu berjuang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan, sebuah narasi yang terus-menerus diproduksi untuk meningkatkan nasionalisme (Gerry van Klinken & Maarten van Der Bent, 2023, hlm. 141).

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun narasi nasionalisme selalu melekat, pembentukan memori kolektif Pertempuran Surabaya sangat dipengaruhi oleh kepentingan penguasa saat itu. Sukarno membentuk memori Pertempuran Surabaya untuk membangun kesadaran kewargaan dan identitas Indonesia di kancah global. Ia membangun memori tersebut melalui Monumen Tugu Pahlawan dan upacara peringatan Hari Pahlawan. Sementara itu, Suharto membentuk memori Pertempuran Surabaya untuk menyampaikan pesan pembangunan, menonjolkan peran militer, serta merawat narasi kekejaman yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Suharto memelihara memori pertempuran ini melalui berbagai bentuk, seperti patung, monumen, buku teks, prasasti, dan kurikulum. Baik di era Sukarno maupun Suharto, pembentukan memori kolektif disertai dengan proses selektif. Aspek-aspek yang dianggap dapat merusak narasi nasionalisme dan identitas nasional sengaja dihilangkan, seperti ketidakpaduan antara gerakan di pusat dan di daerah, serta kisah kekerasan yang dilakukan pejuang revolusi terhadap warga sipil, anak-anak, dan wanita Eurasia. Proses seleksi ini bertujuan untuk menjaga citra kepahlawanan yang homogen dan menghindari ingatan yang dapat merusak narasi

perjuangan yang ideal. Dengan demikian, memori kolektif Pertempuran Surabaya tidak hanya berfungsi untuk mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga sebagai alat politik yang digunakan oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan dan kekuasaan mereka. Proses penghapusan memori secara sengaja terhadap aspek-aspek tertentu dari sejarah menunjukkan bagaimana memori dapat dimanipulasi sesuai dengan ideologi dominan pada masanya. Memori Pertempuran Surabaya yang terbentuk selama kedua periode ini mencerminkan tidak hanya kenangan kolektif tentang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga kepentingan politik yang menentukan arah pembentukan identitas nasional.

REFERENCES

- Abdul Wahid. (2013, November 12). The Untold Story of the Surabaya Battle of 1945. Diambil 18 September 2024, dari The Jakarta Post website: <https://www.thejakartapost.com/news/2013/11/12/the-untold-story-surabaya-battle-1945.html>
- Abidin Kusno. (2009). Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Suharto. Yogyakarta: Ombak.
- Aditya Nugroho Widiadi. (2019). Historical Significance in Indonesian History: The Position of the Battle of Surabaya 1945 in Indonesian Curriculum and History Textbooks. Dipresentasikan pada Proceedings of the 1st International Conference on Social Knowledge Sciences and Education (ICSKSE 2018), Batu, Indonesia. Batu, Indonesia: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icskse-18.2019.15>
- Adrian Vickers. (2011). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Insan Madani.
- Alexander Haryanto. (2021, November 8). Fakta-fakta Sejarah Hari Pahlawan 10 November, Apa Saja Isinya? Diambil 15 September 2024, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/fakta-fakta-sejarah-hari-pahlawan-10-november-apa-saja-isinya-f6Qo>
- Anderson, B. R. O. (1983). Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective. *Journal of Asian Studies*, 42(3), 477–496. <https://doi.org/10.2307/2055514>
- Anonim. (1970, November 9). Presiden Hadiri hari Pahlawan Jang Dipusatkan di Surabaya. Kompas.
- Anonim. (1974, November 7). Keterangan Detail Sekitar 10 Nopember Dikumpulkan. Kompas.
- Anonim. (1981, November 10). Mereka Tidak Tahu lagi Apa Makna Tugu Itu. Kompas.
- Anonim. (1984, November 13). Peringatan hari Pahlawan di Surabaya Berjalan Penuh Khidmat. Berita Yudha.
- Anonim. (1987, April 6). Pres. Soeharto Resmikan Jembatan Soerjo S'bayu, Bendungan Gondang. Bisnis Indonesia.
- Anonim. (1988, November 12). Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya. Kompas.
- Anonim. (2022, November 11). Kisah Heroik Madun Hadang Pasukan Inggris di Balik Patung Perjuangan Tunjungan. Diambil 16 September 2024, dari Detikjatim website: <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6400538/kisah-heroik-madun-hadang-pasukan-inggris-di-balik-patung-perjuangan-tunjungan>

- Anonim. (2023a, Juni 20). Monumen Wira Surya Agung – Direktori. Diambil 18 September 2024, dari Vokasi Unair website: <https://direktori.vokasi.unair.ac.id/2023/06/20/monumen-wira-surya-agung/3655/monumen/vokasi/>
- Anonim. (2023b, Juni 23). Monumen Perjuangan Polisi Republik Indonesia. Diambil 18 September 2024, dari Vokasi Unair website: <https://direktori.vokasi.unair.ac.id/2023/06/23/monumen-perjuangan-polisi-republik-indonesia/2269/monumen/vokasi/>
- Anonim. (2023c, Juni 23). Tentang Monumen Gubernur Suryo. Diambil 17 September 2024, dari Vokasi Unair website: <https://direktori.vokasi.unair.ac.id/2023/06/23/monumen-gubernur-suryo/5487/monumen/vokasi/>
- Antony Reid. (2018). *Indonesia, Revolusi, dan Sejumlah Isu Penting*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Assmann, A. (2008). Transformations between History and Memory. *Social Research*, 75(1), 49–72.
- Besuki. (1978, November 10). Mengenang Hari Pahlawan. *Kompas*.
- Bijl, P. (2012). Colonial memory and forgetting in the Netherlands and Indonesia. *Journal of Genocide Research*, 14(3–4), 441–461. <https://doi.org/10.1080/14623528.2012.719375>
- Cribb, R. (2008). The Brief Genocide of Eurasians in Indonesia, 1945/46. Dalam *Empire, Colony, Genocide* (hlm. 424–439). Oxford: Berghahn Books. <https://doi.org/10.1515/9781782382140-019>
- Frederick, W. H. (2012). The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia's national revolution (1945–49): A 'brief genocide' reconsidered. *Journal of Genocide Research*, 14(3–4), 359–380. <https://doi.org/10.1080/14623528.2012.719370>
- George McTurnan Kahin. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Gerry van Klinken & Maarten van Der Bent. (2023). *East Java, 1949: The Revolution that Shaped Indonesia*. Dalam *Revolutionary Worlds* (hlm. 129–155). Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Gross, T. (2002). Anthropology of Collective Memory: Estonian National Awakening Revisited. *Trames*, 6(4), 342–354.
- Hermawan Sulisty. (1989, November 10). Siapakah Pemeran Revolusi Surabaya. *Kompas*.
- Hurek, L. (2022, Januari 18). Monumen Polri Saksi Perjuangan Polisi Istimewa. Diambil 18 September 2024, dari Radar Surabaya website: <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/77977845/monumen-polri-saksi-perjuangan-polisi-istimewa>
- Irfani, A. (2016). Nasionalisme Bangsa dan Melunturnya Semangat Bela Negara. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 10(2). <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.613>
- Lambertus Hurek. (2021, Oktober 26). Monumen Bambu Runcing Simbol Perjuangan Arek Suroboyo Diresmikan 25 Mei 1981. Diambil 18 September 2024, dari Radar Surabaya website: <https://radarsurabaya.jawapos.com/kota-lama/77976010/monumen-bambu-runcing-simbol-perjuangan-arek-suroboyo-diresmikan-25-mei-1981>

- Michael Rothberg. (2009). *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. California: Stanford University Press.
<https://doi.org/10.1515/9780804783330-003>
- Mohammad Agus. (2012). Daripada Orde Baru ke Orde Reformasi: Politik Lokal di Indonesia Pasca Orde Baru. *Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 39(1), 76–97.
- Museum Sepuluh Nopember. (t.t.). *Pembangunan Tugu Pahlawan*. Surabaya.
- Nugroho Notosusanto. (1970). *The Battle of Surabaya*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Nugroho Notosusanto (Ed.). (1985). *Pertempuran Surabaya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- O.D.Y. (1995, November 24). Presiden: Yang Jelek itu Jangan Diungkit-ungkit. *Kompas*.
- Onghokham. (1985). Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas. *Prisma*, 14(8), 3–11.
- Putra, H. S. A. (2001). Remembering, Misremembering and Forgetting: The Struggle over “Serangan Oemoem 1 Maret 1949” in Yogyakarta, Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 29(3), 471–494.
- Raben, R. (2012). On Genocide and Mass Violence in Colonial Indonesia. *Journal of Genocide Research*, 14(3–4), 485–502. <https://doi.org/10.1080/14623528.2012.719673>
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since C.1200* (4 ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Roeslan Abdulgani. (1981). Dialog: Melacak Jejak Revolusi. *Prisma*, X(8), 62–72.
- Roewadji. (1995, Juni 16). Menikmati Wana Wisata Monumen Soejo. *Berita Yudha*.
- Sarkawi B. Husain. (2010). *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)*. Jakarta: LIPI Press. Diambil dari <https://penerbit.brin.go.id/press>
- Sartono Kartodirdjo. (1981). Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural. *Prisma*, X(8), 3–13.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1986). *30 Tahun Indonesia Merdeka* (7 ed.). Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Spiegel, G. M. (2002). Memory and History: Liturgical Time and Historical Time. *History and Theory*, 41(2), 149–162. <https://doi.org/10.1111/0018-2656.00196>
- Van Der Veur, P. W. (1960). Eurasian Dilemma in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.2307/2050071>
- Yusuf Abdullah Puar. (1981, November 10). Simbolik Sebuah Tugu Pahlawan. *Kompas*.
- Zulkarnain. (2019). History Curriculum Policy for Highschool In New Order Era. *Atlantis Press*, 323, 367–371. <https://doi.org/10.2991/ICOSSCE-ICSMC-18.2019.65>